

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga berkewajiban dan berhak untuk menjamin perlindungan anak dengan bentuk menghormati hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, etnik, dan budaya. Pemerintah Kota Semarang membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (yang kemudian disingkat dengan DP3AKB) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016. DP3A memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah. Rumusan masalah penulisan hukum ini meliputi, bagaimana bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang dan apa saja kendala dan hambatan yang timbul dalam upaya perlindungan terhadap anak?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, dan studi Pustaka. Metode analisis data ini menggunakan analisis kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan wawancara secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan berperan penting dalam memberikan upaya pencegahan dalam perlindungan anak, bentuk perlindungan yang diberikan apabila anak tidak menjadi korban dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya untuk mendengarkan kemauan dari anak dan memberikan strategi tentang cara memberikan empati kepada anak dan menghargai hak-hak anak. Kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan UPTD PPA dalam memberikan pelayanan perlindungan kepada anak berasal dari internal yang berupa keterbatasan SDM dan kurangnya sarana prasarana. Faktor eksternal disebabkan oleh adanya perubahan budaya, lambatnya proses hukum, dan kurangnya tenaga psikolog.

Kata Kunci : Impelementasi; Peraturan Daerah; Perlindungan Anak;

ABSTRACT

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak explains that the State, government, community, family have the obligation and right to guarantee the protection of children in the form of respecting children's rights regardless of ethnicity, religion, race, class, ethnicity, and culture. The Semarang City Government established the Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Service (later abbreviated as DP3AKB) based on Semarang City Regional Regulation No. 14 of 2016. DP3A has the task of assisting the Mayor in carrying out government affairs in the area of Women's Empowerment and Child Protection which is under their authority area and assistance provided by the Regional Head. The formulation of the problem of writing this law includes, what form of child protection is carried out by the DP3A Semarang City and what are the obstacles that arise in efforts to protect children?

This research uses a normative juridical approach and the research specifications used in this research are descriptive, which is one type of qualitative research. This data collection method uses interview techniques and literature study. This data analysis method uses qualitative analysis which aims to describe interviews directly.

Based on the results of the study, the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Office has an task of assisting the Mayor in carrying out government affairs in the area of Women's Empowerment and Child Protection and important role in providing preventive efforts in child protection, a form of protection provided if children do not become victims by educating the community on the importance of listening to the will of children and providing strategies on how to provide empathy to children and respect children's rights. The obstacles experienced by the Semarang City Women's Empowerment and Child Protection Office and UPTD PPA in providing protection services to children come from internal in the form of limited human resources and lack of infrastructure. External factors are caused by cultural changes, slow legal processes, and lack of psychologists.

Keywords: Implementation; Local Regulations; Child Protection;